

Pasar Besar Malang Tetap Sebagai Pasar Rakyat Bukan Mall

- Oleh: Argha Saputra - Editor: Rini Rustriani Lesti Handayani - 08 Feb 2023



KBRN, Malang : Pasca terjadi kebakaran pada 2016 yang lalu, Pemerintah Kota Malang akan merevitalisasi pasar besar usai kerjasama dengan PT Matahari Putra Prima sepakat diakhiri oleh kedua belah pihak.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menggambarkan, pihaknya saat ini tengah melengkapi semua dokumen diantaranya adalah *Detailed Engineering Design* (DED) dan Keterangan Rencana Kota (KRK). Dokumen-dokumen tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan rencananya pada minggu ini segera dikirimkan ke pemerintah pusat.

“Kita mohon doa restu dari masyarakat dan pedagang yang ada di pasar besar semoga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Ia lalu mengungkapkan, sesuai dengan DED, anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat estimasinya sebesar Rp. 300 hingga Rp.350 miliar rupiah. Anggaran itu akan digunakan merevitalisasi bangunan pasar besar yang mempunyai tiga lantai sekaligus untuk menata pedagang serta lokasi parkirnya. Eko Sri Yuliadi selanjutnya menjelaskan, jika melihat kondisi *existing* pasang besar hari ini, tentu pilihannya adalah melakukan

revitalisasi tidak sekadar rehab semata, sebab apabila perbaikannya hanya sebagian dikhawatirkan ke depan memerlukan pembenahan ulang.

“Anggaran ini memang untuk diperuntukkan untuk pasar rakyat dan untuk pedagang. Artinya APBN memang untuk rakyat. Fasilitas-fasilitas kita penuh semua. Satu parkir. Dua penataan pedagang. Kemudian ketiga penanganan banjir, kan kondisi pasar kita lebih rendah dari jalan. Ini sudah menjadi perhatian khusus dari kita,” terangnya.

Menjawab kekhawatiran para pedagang yang takut pasar besar beralih fungsi menjadi pasar moderen, Eko Sri Yuliadi meyakinkan bahwa konsep pasar besar tetap selayaknya sebagai pasar rakyat bukanlah *mall*.

“Mall tidak ada tetapi kita harus mengikuti perkembangan, kondisi bangunan sekarang kan bagus-bagus. Makanya kita sudah punya standar SNI pasar rakyat. *Item* itu yang kita penuh semuanya,” tegasnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menyadari kekhawatiran dari para pedagang pasar yang takut kejadian di pasar dinoyo terulang, dimana pasca revitalisasi pedagang pasar malah tidak mendapat ruang berjualan yang cukup hingga terkatung-katung di pasar penampungan. Oleh sebab itu, masukan pedagang yang ingin pasar besar cukup direhab atau rekondisi saja tetap akan ditampung sebagai bahan diskusi dengan Diskoperindag dalam waktu dekat.

“Kasus yang sempat mencuat kemarin di lapangan kan seperti di Blimbing, pasarnya berkurang dari satu hektar menjadi setengah hektar. Setengah hektar lainnya mau dibangun kondominium. Memang menjadi permasalahan ketika kita melibatkan pihak ketiga untuk membangun. Otomatis dia ada orientasi bisnis. Kalau ini kan tidak, semuanya digunakan untuk kepentingan pedagang karena biayanya dari APBN,” jelasnya.

Trio Agus Purwono berharap agar pedagang tidak terlalu khawatir namun bersama Komisi B DPRD Kota Malang mereka diminta tetap mengawal jalannya revitalisasi pasar besar.